

	Journal Of Government and Social Issues (JGSI) Volume 2 (1) 2022: xx-xx E- ISSN: 2829-1263, P- ISSN:2830-0270 DOI: --	
---	--	--

ARTICLE



Perbandingan Komunikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E-Musrenbang (Studi Kasus Pelaksanaan E-Musrenbang Tahun 2023 di Kabupaten Mesuji)

Muhammad Taufiq Widodo¹
Tina Kartika²

¹Mahasiswa Doktor Studi Pembangunan Universitas Lampung, Lampung, Indonesia

²Dosen Doktor Studi Pembangunan Universitas Lampung, Lampung, Indonesia

How to cite:

Widodo, M. Taufiq & Kartika, Tina. (2022). PERBANDINGAN KOMUNIKASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS E-MUSRENBANG (Studi Kasus Pelaksanaan E-Musrenbang Tahun 2023 di Kabupaten Mesuji). *Journal Of Government and Social Issues (JGSI)* 2(1). 1-11.

Article History

Dikirim: 4
November 2022
Diterima: 27
Februari 2023
Dipublikasi: 12
April 2023

Kata Kunci:

Komunikasi
Pembangunan
Demokrasi

ABSTRAK

Demorasi merupakan nilai-nilai yang disepakati bisa menjamin tersalurkannya partisipasi masyarakat. Musyawarah perencanaan pembangunan merupakan sarana komunikasi yang melibatkan masyarakat sebagai subjek dari rencana pembangunan tersebut. Komunikasi pembangunan merupakan segala upaya penyampaian gagasan dan keterampilan pembangunan memiliki peran penting dalam konteks pembangunan dan perubahan sosial. Kemajuan teknologi yang sekaligus berbenturan dengan pandemi Covid-19 yang membuat teknologi komunikasi dan informasi makin marak digunakan bahkan pada sktor pemerintahan, yang menekankan pada sisi pelayanan publik yang berbasis digital. Adanya e-musrenbang merupakan bagian dari inovasi dan juga kepedulian dari pemerintah terhadap masyarakat, untuk tetap dapat ikut serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Pembangunan pedesaan hingga saat ini masih tetap merupakan bidang kajian yang menarik karena memiliki kedudukan yang strategis dalam pembangunan nasional.

Keywords:

Communication
Development
Democracy

ABSTRACT

Demotion are agreed values that can guarantee the distribution of community participation. Development planning deliberation is a means of communication that involves the community as the subject of the development planner. Development communication is all efforts to convey development ideas and skills that have an important role in the context of development and social change. Technological advances which also collide with the Covid-19 pandemic have made communication and information

* Corresponding Author
Email: taufiqwidodo@gmail.com

technology increasingly widely used even in the government sector, which emphasizes the digital-based side of public services. The existence of e-musrenbang is part of innovation and also the government's concern for the community, to continue to actively participate in development planning activities. Rural development is still an interesting field of study because it has a strategic position in national development.

A. PENDAHULUAN

Istilah pembangunan diasumsikan sebagai perubahan atau upaya perubahan dari satu keadaan ke keadaan lain yang dianggap lebih baik agen perubahan. Berbicara mengenai pembangunan, tentu adanya standarisasi pengukuran yang ditetapkan untuk mencapai perubahan. Dalam menempuh perubahan tentu diperlukannya suatu perencanaan sebagai prosesnya, inilah sebabnya mengapa pembangunan sering disebut sebagai perubahan sosial terencana. Namun pada kenyataannya masih terdapat kegagalan dalam pembangunan, padahal pembangunan dilakukan semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial, justru membuat jurang kesengsaraan semakin dalam. Pembangunan pedesaan hingga saat ini masih tetap merupakan bidang kajian yang menarik karena memiliki kedudukan yang strategis dalam pembangunan nasional. Pembangunan desa tidaklah instan, melainkan bertahap dan butuh konsistensi dalam pelaksanaannya. Karena kesejahteraan suatu desa menjadi suatu gambar dari berhasilnya strategi pembangunan desa dalam rencana pembangunan daerah.

Ada tiga cara berpikir mengenai pembangunan pedesaan di Indonesia. Kelompok pemikir pertama memandang daerah pedesaan dan komunitasnya adalah sesuatu yang unik dan istimewa, dan mengadopsi pendekatan yang membutuhkan intervensi pemerintah sesedikit mungkin untuk mempromosikan pembangunan pedesaan. Di sisi lain, kelompok pemikir kedua yang berkuasa saat itu melihat desa sebagai entitas homogen yang harus dimobilisasi dengan intervensi negara secara maksimal. Gagasan ini mendasari penjabaran berbagai rencana dalam membangun desa, adanya berbagai pengesahan dalam peraturan perundang-undangan, menjadikan desa tidak hanya sebagai daerah yang homogen dan tandus untuk kegiatan politik yang sebenarnya, tetapi juga “peran pemerintah dalam pembangunan”, juga berfungsi sebagai alat. Kelompok pemikir ketiga hadir dengan upaya penyeimbang kekuatan antara masyarakat pedesaan dan negara dalam penentuan arah dan tujuan perubahan sosial masyarakat pedesaan.

Menyimpang dari undang-undang desa yang disahkan bersamaan dengan hiruk pikuk tahun politik, insentif politik mendorong para politisi untuk melobi penyusunan undang-undang desa. Sejak saat itulah kontribusi aktif melalui wujud Pemilihan Kepala Desa yang diyakini sebagai bentuk demokrasi muali merebak dan kian terangkat, bahkan hingga terdeteksi adanya kerawanan konflik saat Pemilu berlangsung. Sehingga perlu kiranya perwujudan pembangunan demokrasi di pedesaan, dimana demokrasi merupakan nilai-nilai yang disepakati bisa menjamin tersalurkannya partisipasi masyarakat, dan dalam realitasnya iklim demokrasi dapat dianggap sejalan dengan pluralitas masyarakat Indonesia. Perdebatan yang membentuk cara kita berpikir tentang pembangunan pedesaan di Indonesia seringkali bersumber dari pendekatan yang digunakan dalam pembangunan itu sendiri.

Musyawarah perencanaan pembangunan merupakan sarana komunikasi yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui forum, masyarakat hadir sebagai subjek

dari rencana pembangunan tersebut. Hal ini juga merupakan aktualisasi demokrasi yang selama ini hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Musrenbang menjadi ajang bagi masyarakat untuk dapat menyampaikan gagasan dan aspirasinya terkait dengan pembangunan. Pada tahap ini masyarakat bertemu dan saling berdiskusi mengenai masalah yang dianggap menjadi prioritas dalam segi pembangunan. Adanya Murenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) bentuk komunikasi dua arah dan menjadi salah satu bagian dari tahapan proses perencanaan pembangunan, yang mana suara masyarakat secara aktif dapat ikut mempengaruhi rencana dalam penyusunan pembangunan suatu daerah melalui komunikasi yang dibangun ketika Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Karena kembali pada tujuan dari musrenbang itu sendiri adalah mengakomodir usulan kegiatan melalui pendekatan bottom-up atau dari bawah ke atas.

Komunikasi menjadi bagian penting dalam menyampaikan pesan atau informasi pembangunan secara efektif. Sebagaimana dengan pendapat yang dikemukakan oleh Edward Depari bahwa komunikasi adalah proses penyampaian gagasan. Hal ini sejalan dengan pandangan Everett M. Rogers yang menyatakan komunikasi adalah proses yang mana suatu ide atau gagasan dialihkan dari pemilik gagasan kepada orang lain untuk mengubah suatu tangkapan laku. Mengacu pada pernyataan Van de Fliert, 2014 dalam (Nindatu, 2019) yang mengatakan fungsi komunikasi pembangunan terbagi menjadi komunikasi kebijakan; Pendidikan; hubungan masyarakat dan strategi komunikasi; komunikasi advokasi dan komunikasi organisasi maka fungsi-fungsi tersebut dilakukan untuk penguatan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat (Nindatu, 2019).

Hal ini mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan, sehingga jelas adanya pusat pembangunan berada ditangan rakyat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Komunikasi pembangunan sangat berguna dalam peningkatan taraf hidup masyarakat baik sosial maupun ekonomi, dimana komunikasi pembangunan dilakukan untuk melaksanakan suatu rencana pembangunan dengan bertukar gagasan atau usulan yang juga terlibat dalam pembangunan, terutama government dan society. Berbicara mengenai komunikasi pembangunan, komunikasi pembangunan terbagi menjadi tiga dan hanya pesan yang disampaikanlah yang membedakannya (Ayu, 2017). Adapun bentuk komunikasi pembangunan diantaranya:

1. Komunikasi Persona, yang kemudian terbagi dua yaitu, komunikasi interpersonal dan komunikasi intrapersona. Menurut Deddy Mulyana dalam (Ayu, 2017) mengatakan komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun non verbal. Sedangkan komunikasi intrapersonal menurut pendapat Ronald L. A dalam (Ayu, 2017) adalah komunikasi yang berlangsung pada diri seorang individu, baik berupa kegiatan berbicara kepada diri sendiri, mengamati, serta memberi makna terhadap lingkungan. Dari segi psikologis yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan konatif.
2. Komunikasi kelompok, merupakan komunikasi yang berlangsung antara komunikator dengan sekelompok orang yang lebih dari dua orang jumlahnya.
3. Komunikasi massa, yang juga ikut melibatkan berbagai media sehingga sering disebutnya komunikasi satu arah.

Semakin terbuka luasnya ruang aspirasi, mendorong mendorong masyarakat untuk dapat bergerak bebas dalam mengungkapkan aspirasinya. Sebuah studi menunjukkan bahwa peran dari aksi kolektif dalam membuat suara masyarakat lebih terdengar dan membuka peluang untuk memberikan pengaruh terhadap keputusan-keputusan sebuah institusi mengenai pelayanan public (Teguh, 2004 dalam (Yunas, 2017)). Berkat aksi tersebut, dapat menjadikan

masyarakat lebih siap untuk terlibat aktif dan berpartisipasi dalam pembangunan. Pendekatan yang tengah dibangun oleh pemerintah melalui UU No. 25 Tahun 2004 dicerminkan pada sebuah rangkaian musrenbang yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten.

Rangkaian musrenbang yang digelar mulai dari tingkat desa hingga kabupaten menjadi bagian dari proses tahapan perencanaan anggaran yang disusun setiap tahunnya. Melalui forum ini masyarakat memiliki peluang besar dalam penyampaian aspirasi dan juga berpartisipasi dalam menghasilkan perencanaan pembangunan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat dapat secara langsung bertemu, berdiskusi, bertatap muka secara langsung untuk membahas segala persoalan yang dianggap penting untuk dibenahi, dan secara bersama merancang sebuah pembangunan.

Seiring dengan kemajuan zaman, dengan melihat adanya penemuan-penemuan baru sebagai akibat dari kemajuan teknologi yang berkembang pesat, semakin mempermudah manusia dalam mengerjakan pekerjaannya. Kemajuan teknologi ini meningkatkan hubungan mobilitas sosial dan mempermudah manusia untuk saling berhubungan satu sama lain. Hal ini juga dibenturkan dengan pandemi Covid-19, yang secara tidak langsung menuntut adanya pelayanan pemerintahan yang tidak boleh terhenti. Sehingga pelayanan pemerintahan dilakukan secara digital.

Berangkat dari hal itu, mendorong adanya sebuah inovasi terbaru dalam system perencanaan pembangunan. Adanya e-musrenbang merupakan kepedulian dari pemerintah terhadap masyarakat, untuk dapat ikut serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pemanfaatan perkembangan teknologi informasi ditengah masyarakat, dan semakin terbuka luasnya bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam mengaspirasikan ide atau gagasan terhadap pembangunan. E-musrenbang sudah mulai banyak diterapkan diberbagai daerah, karena system yang berbasis teknologi dan informasi saat ini tengah diterapkan diberbagai sisi kehidupan bahkan dalam perencanaan pembangunan nasional itu sendiri.

Salah satu daerah yang menerapkan e-musrenbang adalah Kabupaten Mesuji. Kabupaten Mesuji memiliki masalah pada IPM (Indeks Pembangunan Manusia), Kabupaten Mesuji ini menduduki peringkat terakhir diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung berdasarkan data yang diperoleh dari lampung.bps.go.id. Hal ini menjadi masalah serius bagi Kabupaten Mesuji, karena keberhasilan suatu pembangunan daerah salah satunya dilihat dari kualitas sumber daya manusia masyarakatnya, dan IPM menjadi bagian dari bahasan pokok pada perencanaan pembangunan Kabupaten Mesuji yang dibahas mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten.

Pola komunikasi e-musrenbang menjadi sebuah inovasi yang lebih kompleks, dimana penerapan e-musrenbang ini tidak hanya sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan, melainkan telah mencakup Inpres No.3 Tahun 2003 tentang kebijakan strategi nasional elektronik government (e-government). Di satu sisi terdapat keunggulan dari penerapan e-musrenbang, terlihat dari penyajian data yang valid, kegiatan yang tepat sasaran, kelompok sasaran yang tersegmentasi dengan rapi, serta mengefisiensikan waktu dan biaya. Bagaimana dengan komunikasi yang dibangun ketika e-musrenbang, jelas memiliki perbedaan pola komunikasi antara musrenbang dengan e-musrenbang, tidak lagi terdapat diskusi dan tukar pikiran yang sebagaimana dilakukan pada saat musrenbang. Jika menilik kembali mengenai demokrasi rakyat sebagaimana yang dicerminkan melalui pesta demokrasi yaitu Pemilu yang diadakan secara langsung yang disaksikan secara seksama, maka idealnya komunikasi perencanaan pembangunan pun dilaksanakan secara langsung, dan disaksikan secara seksama. Lalu bagaimana perbandingan komunikasi pada musrenbang dengan e-musrenbang yang terjadi di Kabupaten Mesuji.

B. TINJAUAN TEORITIS

Pada dasarnya pembangunan bertujuan untuk menciptakan adanya perubahan keadaan yang lebih, atau dari keadaan semula menjadi keadaan yang lebih maju dan berkualitas. Inti dari pembangunan adalah melakukan perubahan dari suatu keadaan ke arah keadaan yang lebih baik, lebih berkualitas serta lebih maju. Jika melihat kepada Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, disana dinyatakan bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota yaitu Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan, hal juga ditegaskan oleh Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada pasal 14 disebutkan bahwa diantara urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah untuk kabupaten dan kota adalah perencanaan dan pengendalian pembangunan. Dalam merumuskan perencanaan dan mengendalikan pembangunan di daerah salah satu pilar yang merupakan faktor pendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Mildad, 2018).

Komunikasi pembangunan merupakan segala upaya dan cara serta teknik penyampaian gagasan dan ketrampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan dan diwujudkan pada masyarakat yang menjadi sasaran dapat memahami, menerima dan berpartisipasi dalam pembangunan. Menurut Whiting dalam Anwas (2013) dalam (Nindatu, 2019), komunikasi memiliki peran penting dalam konteks pembangunan dan perubahan sosial. Komunikasi dalam pemberdayaan diarahkan untuk membangkitkan motivasi dan potensi yang dimiliki setiap anggota masyarakat agar bangkit dan mampu berdaya untuk mengubah kehidupannya ke arah yang lebih baik. Komunikasi dalam pemberdayaan hanya akan efektif jika dilakukan secara dialogis, interaktif dalam suasana harmonis dan kekeluargaan.

Komunikasi sebagai suatu sistem menjadi bagian dari sistem lain yang lebih besar (supersistem). Komunikasi sebagai suatu sistem memiliki empat fungsi penting dalam perubahan (Ritzer dan Goodman, 2003). (1) Penyesuaian (*Adjustment*): Sistem harus menghadapi situasi eksternal yang kritis. Sistem harus beradaptasi dengan lingkungannya, dan lingkungan harus beradaptasi dengan kebutuhannya. (2) Tujuan tercapai: Sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. (3) Integrasi : Suatu sistem harus mengelola hubungan timbal balik dari bagian-bagian komponennya. Sistem juga harus mengatur keterkaitan tiga fungsi penting lainnya. (4) Latensi (penyimpanan pola): Suatu sistem harus melengkapi, menopang, dan memperkuat motivasi individu dan pola budaya yang menghasilkan dan menopangnya.

Dalam rumusan dari Gomez (dalam Nasution, 1996:128) “komunikasi pembangunan merupakan disiplin ilmu dan praktikum komunikasi dalam konteks negara-negara sedang berkembang, terutama kegiatan komunikasi untuk perubahan sosial yang berencana.” (Heru, 2022). menurut Nasution, 1996:92 dalam arti yang luas, komunikasi pembangunan meliputi peran dan fungsi komunikasi (sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik) di antara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan, terutama antara masyarakat dengan pemerintah, sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap pembangunan. (Heru, 2022).

Wilbur Schramm menyatakan bahwa komunikasi dan masyarakat bagaikan dua kata kembar yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, tanpa adanya proses komunikasi, maka tidak mungkin masyarakat terbentuk, sebaliknya tanpa masyarakat maka manusia tidak mungkin mengembangkan komunikasi. Setiap komunikator memiliki strategi komunikasi yang berbeda dalam mencapai tujuan komunikasi, namun pada hakikatnya semua orang memiliki

tujuan yang sama yakni untuk menciptakan perubahan sikap pada diri khalayak atau komunikan (audience). Perubahan yang diharapkan yakni pada tingkat kognitif, afektif dan psikomotorik. (Mildad, 2018).

Berdasarkan pengamatan para ahli menemukan fungsi komunikasi yang berbeda antara satu dengan lainnya. Misalnya Thomas M. Scheidel mengemukakan bahwa kita berkomunikasi terutama untuk mendukung identitas diri, membangun kontak sosial dan mempengaruhi orang lain dalam berfikir dan berperilaku sesuai dengan yang kita inginkan. Sementara Rudolf F. Verderber mengemukakan bahwa komunikasi mempunyai dua fungsi yakni fungsi sosial dan fungsi pengambilan keputusan. Efektifitas komunikasi jika dibangun atas dasar kesamaan akan mudah untuk mencapai suatu keberhasilan antara komunikator dengan komunikan, begitu pula terjadi pada pemerintah kabupaten Aceh Utara dalam melakukan komunikasi terhadap masyarakat. (Mildad, 2018).

Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) sudah tidak asing lagi di masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijelaskan pada pasal 1 ayat 21 bahwa Musyawarah Rencana Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Selanjutnya pasal 2 ayat 2 yang menjelaskan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan memiliki jenjang perencanaan yang berbeda. (Irmayanti, 2019). Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional adalah sebagai berikut: a. Tahapan perencanaan pembangunan nasional Tahapan pembangunan nasional meliputi: 1) Penyusunan rencana. 2) Penetapan rencana. 3) Pengendalian pelaksanaan rencana. 4) Evaluasi pelaksanaan rencana.

E-Musrenbang merupakan aplikasi perencanaan pembangunan berbasis website yang dibangun untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dari segala tingkatan baik dipusat maupun di daerah. Dalam prosesnya dimulai dari tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kota/forum SKPD. untuk memberikan aspirasi terkait pembangunan yang dibutuhkan masyarakat untuk priode 1 (satu) tahun. (Irmayanti, 2019). E-musrenbang merupakan inovasi yang diusung oleh pemerintah dengan menggunakan teknologi komunikasi dalam pelayanan public yang berbasis digital. E-musrenbang merupakan aplikasi yang dikembangkan dalam mendukung perencanaan pembangunan yang tersinergi secara berjenjang mulai dari tingkat desa hingga tingkat nasional. penerapan e-musrenbang ini tidak hanya sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan, melainkan telah mencakup Inpres No.3 Tahun 2003 tentang kebijakan strategi nasional elektronik government (*e-government*).

Pembentukan e-musrenbang bertujuan untuk meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Pemerintah daerah hingga pemerintah pusat dalam memaksimalkan kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah dengan cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. E-Musrenbang merupakan aplikasi perencanaan berbasis website yang dibangun untuk mendukung upaya sinergi perencanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah. Aplikasi ini dibangun dan dikembangkan oleh kementerian perencanaan Pembangunan Nasional/Badan perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Dengan dikembangkannya emusrenbang berbasis website ini diharapkan dapat membantu mempermudah proses sinergi perencanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya sinergi perencanaan dan penganggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, serta mendorong penerapan prinsip-prinsip good governance (partisipatif, transparan, efektif, dan efisiensi, serta akuntabilitas). (Safira, 2020).

Konsep *E-Musrenbang* dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan cara sebagai berikut:

- Program Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) melalui sistem *online*.
- RKPD *online* merupakan sistem penggabungan dan pengolahan informasi dari berbagai pemangku kepentingan di masyarakat, swasta dan pemerintah daerah untuk merumuskan program dan kegiatan pengembangan masyarakat;
- Usulan pembangunan yang diajukan oleh pemerintah daerah, swasta, atau pemerintah daerah dijabarkan dengan berbagai kebijakan pembangunan daerah. Setelah itu, program dan kegiatan pembangunan dirumuskan oleh pemerintah daerah.

C. METODELOGI

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dalam mendapatkan pemahaman yang lebih rinci mengenai suatu kasus yang telah terjadi. Kasus yang dikaji dalam penelitian ini yaitu perbandingan komunikasi perencanaan pembangunan daerah berbasis e-musrenbang. Data primer dari penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dengan menggunakan wawancara, dan pengamatan. Kemudian, data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari berbagai dokumentasi sesuai dengan kebutuhan. Sumber data utama yang menjadi basis analisis pada penelitian ini adalah seluruh informasi (wawancara, dokumentasi dan kajian pustaka) yang berhubungan dengan kasus yang diangkat dan literatur mengenai pembangunan, komunikasi pembangunan, musrenbang, dan e-musrenbang.

D. DISKUSI DAN HASIL

Kesuksesan pembangunan di ranah pemerintahan sangat ditentukan oleh seperti apa kualitasnya dalam merencanakan pembangunan. Suatu perencanaan akan memberikan arahan yang jelas tentang apa yang menjadi kebutuhan warga pada periode waktu tertentu. Melalui perencanaan, semua kegiatan pembangunan di berbagai sektor memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Oleh karena itu suatu perencanaan akan membantu pelaku pembangunan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tetapi, untuk memastikan keberhasilannya yang sesuai dengan rencana perlu adanya kontrol atau pengawasan. Secara normatif pembangunan negara kita mengikuti sistem politik yang dominan, yaitu sistem politik yang demokratis, dan sistem politik ini menjadi dasar bagi semua kegiatan pemerintahan, termasuk kegiatan perencanaan pembangunan itu selalu mempengaruhi semua orang, pemangku kepentingan, dan pemerintahan negara, adapun aktor kuncinya adalah pemerintah, masyarakat dan sektor swasta.

Melalui UU No.25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional, mekanisme penyusunan rencana pembangunan di tingkat pusat ataupun daerah dilakukan dengan melangsungkan forum yang kemudian disebut dengan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Melalui forum ini, dilakukan untuk menyusun rencana pembangunan baik ditingkat daerah maupun tingkat nasional yang kemudian akan menghasilkan suatu rancangan pembangunan dalam jangka pendek, menengah, dan tahunan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat dan negara secara bersama-sama.

Mekanisme pelaksanaan musrenbang di Kabupaten Mesuji dilakukan setiap tahunnya untuk Menyusun dokumen rencana pembangunan yang berdasar pada RPJM Desa dan juga dokumen rencana tahunan atau RKP Desa. Pelaksanaan musrenbang di Kabupaten Mesuji pada tingkat desa dilaksanakan secara terbuka di balai desa yang dihadiri oleh pemerintah desa, BPD, lembaga desa, tokoh masyarakat dan unsur perwakilan perempuan. Dalam forum tersebut, semua pihak dapat terlibat aktif menyampaikan suara dan usulannya, kemudian langsung dapat berdiskusi dua arah terhadap permasalahan yang dibahas, sehingga dengan begitu melalui forum ini dapat menghasilkan dokumen rencana pembangunan yang

didalamnya merupakan buah hasil pemikiran bersama mengenai aspirasi masyarakat akan kebutuhannya terhadap perencanaan pembangunan.

Seiring kemajuan teknologi, Kabupaten Mesuji ikut andil dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan berbasis digital, berupa e-musrenbang. Permemberlakuan e-musrenbang merupakan suatu inovasi dalam system komunikasi dan informasi antara pemerintah dengan masyarakat, yang diyakini dapat memberikan suguhan informasi berupa data valid atas aspirasi dan partisipasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan. e-musrenbang mendorong adanya transparansi dan akuntabilitas daudulan yang masuk dari masyarakat (Leba, 2015). Penggunaan e-musrenbang di Kabupaten Mesuji sudah diinformasikan kepada masyarakat, melalui kecamatan sebagai perpanjangan tangan dari kabupaten untuk menyampaikan informasi ke tingkat desa dan masyarakat secara umum. Pelaksanaan e-musrenbang telah disepakati pemerintah untuk berjalan konsisten dan tidak berubah setiap tahunnya.

E-musrenbang mempermudah dalam mengkollektif usulan dari masyarakat akan kebutuhannya sebagai perencanaan pembangunan. Masyarakat yang ingin mengetahui usulan kegiatan dapat dengan mudah mengakses informasinya melalui situs E- Musrenbang yang ada. Pada tahapan perencanaan dan penganggaran, dinamika perubahan sangat tinggi dan komplek. Hal ini menjadi daya tarik masyarakat dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif dan berkuaitas dengan melihat perencanaan yng terbuka dan tersusun dengan baik. Akan tetapi, melihat kondisi di lapangan mendapat reaksi yang kurang mengenakan dan mendapat penolakan dari masyarakat. Ditandai dengan banyaknya kritikan masyarakat yang masuk terkait dengan penggunaan e-musrenbang. Masyarakat menanyakan pelaksanaan prinsip demokrasi yang selayaknya dilakukan secara langsung tidak lagi dilakukan.

Hasil kajian terkait proses komunikasi perencanaan pembangunan di Kabupaten Mesuji menggambarkan adanya perbedaan pola komunikasi yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan antara musrenbang dengan e-musrenbang. Pelaksanaan musrenbang terbagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Pada tahap persiapan, kepala desa membentuk tim penyelenggara untuk kemudian mengundang peserta musrenbang dan mempersiapkan kebutuhan baik sarana dan prasarana hingga materi yang akan disampaikan. Pada tahap pelaksanaan, dilakukan oleh kepala desa dalam menyampaikan materi, kemudian memberikan kesempatan kepada peserta musrenbang untuk dapat mengusulkan, mengungkapkan aspirasinya, berdiskusi dua arah untuk sama-sama menencanakan kegiatan pembangunan yang dipimpin oleh ketua forum dalam musyawarah tersebut, biasanya diwakilkan dari unsur masyarakat.

Komunikasi dan interaksi yang digunakan selama pelaksanaan musrenbang yaitu komunikasi secara langsung dengan bentuk komunikasi interpersona. Memperllihatkan komunikasi dua pihak yang dibangun secara tatap muka dengan memungkinkan setiap pihak dapat menangkap reaksi atau responnya secara langsung baik melalui ucapan ataupun gerak tubuh. Pada tahap ini, setelah berdiskusi panjang mengenai rencana pembangunan, kemudian dilanjutkan dengan perumusan dan penetapan dari rencana yang dianggap menjadi prioritas dalam pembangunan. tidak berhenti disitu, melainkan adanya penetapan maksimal 5 orang daftar nama delegasi yang akan dikirimkan pada musrenbang tingkat kecamatan, yang tentunya memperhatikan unsur dari keterwakilan perempuan. Sehingga dengan demikian, masyarakat terlibat aktif dalam regulasi penyampaian aspirasi pada musyawarah perencanaan pembangunan.

Bereda halnya dengan pelaksanaan e-musrenbang, dimana system e-musrenbang ini dibuat untuk menyederhanakan, dan meningkatkan efektifitas serta efisiensi waktu dalam rangka memaksimalkan kinerja perencanaan pembangunan daerah dengan cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Mekanisme pelaksanaan e-musrenbang di Kabupaten Mesuji dimulai dari

masyarakat yang menyampaikan gagasan dan usulannya pada saat musrenbang desa, kemudian dari usulan dan gagasan tersebut diinput, dan diverifikasi oleh kecamatan untuk dibahas dalam musrenbang kecamatan, setelah itu usulan yang terpilih pada musrenbang kecamatan akan dibahas pada musrenbang kabupaten. Pada saat musrenbang desa usulan yang menjadi kewenangan kabupaten akan langsung diajukan oleh desa kepada Bappelitbangda untuk segera diinput kedalam SIPD.

Setelah usulan masuk SIPD selanjutnya akan diverifikasi apakah usulan tersebut masuk kedalam kewenangan kabupaten atau bukan, usulan yang masuk kedalam kewenangan kabupaten akan dibahas pada musrenbang kecamatan. Pada saat musrenbang kecamatan, usulan tersebut akan diprioritaskan sesuai dengan keadaan di lapangan, yang kemudian akan dibahas pada forum perangkat daerah untuk penentuan prioritas usulan yang akan di diakomodir saat musrenbang kabupaten, lalu usulan tersebut akan masuk pada RKP daerah. Ketika usulan dari masyarakat mendapat rekomendasi revisi dari perangkat daerah, maka usulan tersebut akan dikembalikan untuk perbaikan usulan.

Sejauh ini, kelebihan dari penggunaan e-musrenbang di Kabupaten Mesuji terlihat dari efisiensinya waktu dan juga tenaga dengan melihat SDM yang rendah melalui IPM Kabupaten Mesuji yang berada pada tingkat paling bawah di provinsi Lampung. Melihat mekanisme yang digunakan e-musrenbang, pola komunikasi yang dibangun oleh pemerintah desa dengan masyarakatnya semakin tidak menurun. Tidak adanya lagi perwakilan dari masyarakat yang didelegasikan untuk ikut serta berdiskusi pada musrenbang tingkat kecamatan dan kabupaten. Tidak ikut serta masyarakat membuat komunikasi antar pemerintah daerah dengan masyarakat semakin renggang, walau masyarakat dapat memantau melalui aplikasi yang tersedia. Euforia musyawarah secara langsung yang merupakan adaptasi dari pesta demokrasi kini tengah memudar, dengan semakin berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi yang juga mencuat pada ranah perencanaan pembangunan.

Selain itu, dengan melihat dominasi masyarakat Kabupaten Mesuji yang masih memiliki Indeks Pembangunan Manusia yang rendah, partisipasi terhadap e-musrenbang yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi membuat sedikitnya partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pemantauan e-musrenbang tersebut, ditambah dengan masyarakat yang masih belum terbiasa bekerja dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi menjadi pekerjaan tersendiri dalam menerapkan e-musrenbang di Kabupaten Mesuji. Sehingga dengan demikian pola komunikasi yang dibangun dari dua skema yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan. Masyarakat lebih mendukung adanya pola komunikasi secara langsung yang menghendakinya pertemuan tatap muka karena sebagai perwujudan dari pesta demokrasi.

E. SIMPULAN

Berdasarkan perbandingan komunikasi perencanaan pembangunan daerah berbasis musrenbang dan e-musrenbang di Kabupaten Mesuji dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan perencanaan pembangunan musrenbang dengan e-musrenbang memiliki dua skema atau mekanisme yang berbeda.
2. Penerapan e-musrenbang di Kabupaten Mesuji dapat memberi dampak pada efisiensinya waktu dan juga tenaga dengan melihat SDM yang rendah melalui IPM Kabupaten Mesuji yang berada pada tingkat paling bawah di provinsi Lampung.
3. Penerapan e-musrenbang memiliki perbedaan pola komunikasi yang terjalin, dengan tidak lagi mengirimkan masyarakat sebagai delegasi dalam musrenbang pada tingkat kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal/Buku

- Abady, A. P. (2013). Perencanaan partisipatif dalam pembangunan daerah. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1).
- Armawan, I. (2021). Strategi Komunikasi Pembangunan Masyarakat. *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, 1(2), 84-95.
- Ayu, D. R. (2017, 1 3). *Apa yang Dimaksud dengan Komunikasi Pembangunan*. Retrieved from dictio: <https://www.google.com/>
- Hafied Cangara, Perencanaan Dan Strategi Komunikasi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 44.
- Heru. (2022, 10 28). *Komunikasi Pembangunan Menurut Ahli dan Penerapannya*. Retrieved from Pakar Komunikasi: <https://pakarkomunikasi.com/>
- Irmayanti, D. (2019). PENGARUH MANFAAT DAN KEMUDAHAN E-MUSRENBANG DI ERA DIGITAL TERHADAP PENGGUNAAN E-MUSRENBANG DALAM MENDUKUNG PERENCANAAN PEMBANGUNAN PADA BAPPEDA KOTA BINJAI. . *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains*, 1(01).
- Mildad, J. (2018). KOMUNIKASI PEMBANGUNAN MELALUI MUSYAWARAH RENCANA. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(3).
- Nindatu, P. I. (2019). KOMUNIKASI PEMBANGUNAN MELALUI. *Jurnal Perspektif Komunikasi*, Vol. 3 No.2.
- Oktarina, Y. &. (2017). *Komunikasi dalam perspektif teori dan praktik*. Deepublish.
- Rafinzar, R., & Kismartini, K. (2020). Inovasi E-Government Dalam Pelayanan Publik (Studi Pada Faktor Pendukung dan Penghambat Program E-Musrenbang di Kota Surabaya). *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 227-250.
- Rochayat Harun and Elvinaro Ardianto, *Komunikasi Pembangunan Dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 165–166.
- Safira, E. (2020). *Pemanfaatan E-Musrenbang Dalam Meningkatkan Efektivitas Perencanaan Pembangunan Daerah Di Tingkat Kelurahan Kota Medan* (Doctoral dissertation, UMSU).
- SARI, M. P. (2017). *KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DALAM SISTEM INFORMASI DESA (Studi Pada Gerakan Desa Membangun (GDM) Lampung di Desa Hanura Kec. Teluk Pandan Kab. Pesawaran)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Suherman, N. & Muluk, S. (2008). *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kabupaten/ Kota*. Bandung : FPPM
- Yunas, N. S. (2017). Efektivitas E-Musrenbang di Kota Surabaya dalam Sistem Perencanaan. : *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, p-ISSN: 2088-3706, e-ISSN: 2502-9320, 19-27.

Sumber lainnya:

- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Inpres No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Strategi Nasional Elektronik Government (E-Government).

Berita Online

Admin. 2018. Musrenbang! Wabup Mesuji Harapkan Dukungan Warga dalam Upaya Membangun Daerah. <https://kupastuntas.co/>. Diakses pada 01 November 2022 pukul 11.03 WIB.

Bappenas. (2015). Tentang E-Musrenbang. Diperoleh dari: <https://emusrenbang.bappenas.go.id>.

Kab-Mesuji. 2018. Wabup Saply Buka Musrenbang Kecamatan Simpang Pematang. <https://mesujikab.go.id/>. Diakses pada 01 November 2022 puku 11.05 WIB.
<https://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB21413344019.pdf>.
<http://emusrenbang.banggaikep.go.id/>.